

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWASI
ALOKASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
DESA LABUHAN BONTONG KECAMATAN TARANO
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018**

SKRIPSI



Oleh:

FIKY RISKI
NIM. 21513A0039

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2019

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWASI
ALOKASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
DESA LABUHAN BONTONG KECAMATAN TARANO
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI



Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Tahun 2018
Nama Mahasiswa : Fiky Riski
Nomor Induk Mahasiswa : 21513A0039
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dinyatakan bahwa skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram untuk diajukan ke sidang skripsi.

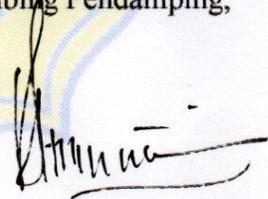
Mataram, 20 Agustus 2019

Menyetujui :

Pembimbing Utama,

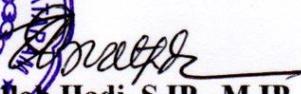
Pembimbing Pendamping,


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902


Azwar Subandi, S.IP., MH
NIDN. 0818018101

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWASI ALOKASI DANA
DESA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA LABUHAN
BONTONG KECAMATAN TARANO KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2018**



Disusun dan diajukan oleh;

FIKY RISKI
NIM. 21513A0039

PROGRAM STUDY
STUDY PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal 23 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

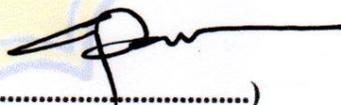
Tim penguji,

1. Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

Ketua (.....)

2. Azwar Subandi, S.IP., MH
NIDN. 0818018101

Anggota I (.....)

3. Lalu Sopan Tirta K, S.IP., M.Si Anggota II (.....)
NIDN. 0825038303

Mengesahkan
Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Drs. Amil, MM
NIDN. 0831126204

MOTO

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil
tapi berusaha menjadi manusia yang berguna.

(Einstein)

Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.

(Aristoteles)



PERSEMBAHAN

- ❖ Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayahanda tercinta M. Nur Meng dan Ibunda tercinta Salma M. Ananda takkan pernah lupa semua pengorbanan dan jerih payah yang engkau berikan sehingga saya dapat menggapai cita-cita dan semangat serta doa yang kau lantunkan, sehingga Ananda dapat meraih kesuksesan ini. Asa Ananda kelak dapat membahagiakan dirimu sampai akhir hayatmu, semoga. Doakan saya Ayah, doakan saya Ibu.
- ❖ Untuk kakak dan adikku tersayang, Ninik, Ardiansyah, Sukri, Rini, Irgi, dan Rasya yang tiada bosan-bosannya selalu menasihati dan mendukungku dalam segala hal, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- ❖ Rekan-rekan mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.
- ❖ Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiky Riski
NIM : 21513A0039
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Tahun 2018

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Matama, Agustus 2019
Yang membuat pernyataan,



FIKY RISKI
NIM. 21513A0039

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt., atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada setiap makhluk-Nya yang ada di dunia ini, serta berkat kemurahan dan petunjuk-Nya, peneliti bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Tahun 2018.”

Tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari kontribusi dan motivasi dari berbagai pihak yang telah sudi meluangkan waktunya. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan peluang kepada peneliti untuk menyelesaikan studi di kampus tercinta.
2. Bapak Drs. Amil, M.M Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Mardiah, S.Sos., M.Si Selaku wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.SI, Selaku wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., MA., Selaku Kanprodi Ilmu Pemerintahan.
6. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., MA., Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian skripsi ini

7. Bapak Azwar Subandi, S.IP., M.H Selaku Pembimbing II yang tidak lelah dan penuh pengertian untuk membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini.
8. Kedua orang tua, yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan doa restunya.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Mataram, Angkatan 2015 yang memberikan semangat dan dukungan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan demi penyempurnaan pada masa yang akan datang. Akhirnya, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Mataram, Agustus 2019
Peneliti,

FIKY RISKI
NIM. 21513A0039

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Tinjauan Tentang Partisipasi.....	8
2.1.1. Pengertian Partisipasi.....	8
2.1.2. Bentuk-Bentuk Partisipasi.....	9
2.1.3. Tingkat Partisipasi.....	12
2.1.4. Faktor Keberhasilan Partisipasi.....	14
2.1.5. Faktor Penghambat Partisipasi.....	14
2.2. Tinjauan Tentang Masyarakat.....	15

2.2.1. Pengertian Masyarakat.....	15
2.2.2. Ciri-Ciri Masyarakat.....	17
2.2.3. Unsur-Unsur Masyarakat.....	18
2.3. Tinjauan Tentang Model Pembangunan Partisipasi.....	19
2.4. Tinjauan Tentang Desa.....	20
2.4.1. Pengertian Desa.....	20
2.4.2. Jenis-Jenis Desa.....	22
2.4.3. Keuangan Desa.....	24
2.5. Tinjauan Tentang Alokasi Dana Desa.....	25
2.5.1. Pengertian Alokasi Dana Desa.....	25
2.5.2. Tujuan alokasi Dana Desa.....	26
2.5.3. Manfaat Alokasi Dana Desa.....	27
2.6. Tinjauan Tentang Perekonomian Masyarakat Desa.....	28
2.6.1. Pengertian Perekonomian Masyarakat Desa.....	28
2.6.2. Faktor Pengaruh Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa.....	30
2.6.3. Sektor yang Menopang Masyarakat Desa.....	31
2.6.4. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
3.2. Fokus Penelitian.....	38
3.3. Lokasi Penelitian.....	39
3.4. Jenis Data.....	39
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6. Teknik Analisis Data.....	43
3.7. Uji Keabsahan Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Profil Desa	47
4.2. Alokasi Dana Desa.....	54
4.3. Hasil Penelitian.....	72

4.3.1. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi alokasi dana desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa	72
4.3.2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa	79
4.4. Pembahasan.....	81
4.4.1. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi alokasi dana desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.	81
4.4.2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa	83
BAB IV PENUTUP	85
5.1. Simpulan.....	85
5.2. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lembar Observasi.....	41
Gambar 2. Pedoman Wawancara Tak Terstruktur.....	42
Gambar 3. Teknik Analisis Interaktif Miles dan Huberman.....	45
Gambar 4. Alokasi Dana Desa Tahun 2018.....	54

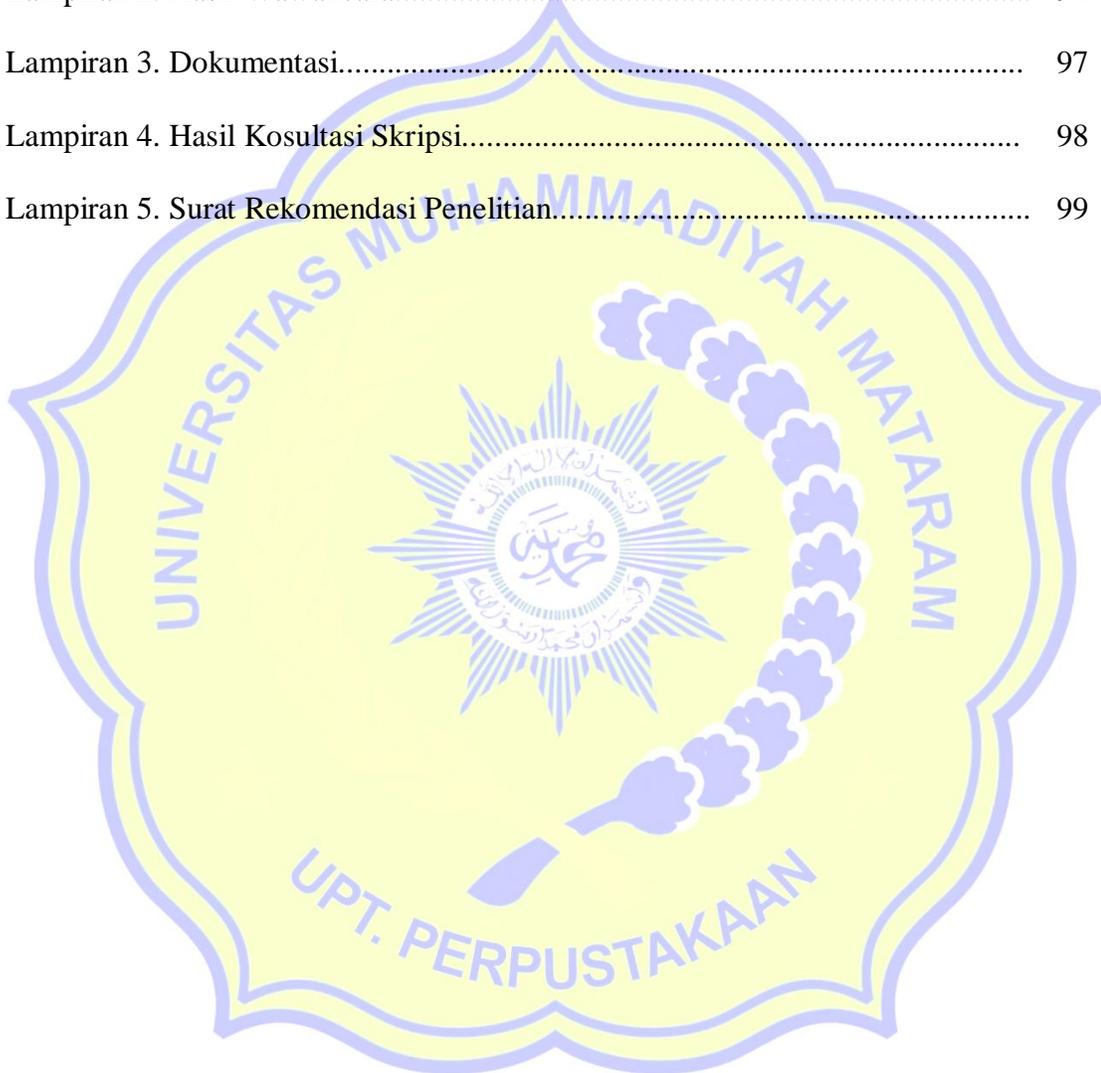


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi Geografis Desa Labuhan Bontong.....	49
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Labuhan Bontong.....	52
Tabel 3. Jumlah Keluarga.....	53
Tabel 4. Jumlah Pengangguran.....	53
Tabel 5. Rincian Anggaran Kegiatan Pemerintah Desa.....	56
Tabel 6. Rincian Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	62
Tabel 7. Rincian Anggaran Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan.....	66
Tabel 8. Rincian Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.....	70
Tabel 9. Rincian Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.....	71
Tabel 10. APBDes Tahun 2018.....	75
Tabel 11. Pelaksanaan Pembangunan Desa Lab. Bontong.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Observasi.....	90
Lampiran 2. Hasil Wawancara.....	91
Lampiran 3. Dokumentasi.....	97
Lampiran 4. Hasil Kosultasi Skripsi.....	98
Lampiran 5. Surat Rekomendasi Penelitian.....	99



ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWASI ALOKASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA LABUHAN BONTONG KECAMATAN TARANO KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018

Oleh

FIKY RISKI
NIM 21513A0039

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam mengawasi alokasi dana desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengawasi alokasi dana Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.

Tinjauan pustaka penelitian ini adalah partisipasi, masyarakat, model pembangunan partisipasi, desa, alokasi dana desa, perekonomian masyarakat desa.

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas datanya menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini berupa partisipasi masyarakat dalam mengawasi Alokasi Dana Desa yang terdiri dari tiga bentuk yaitu (1) Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan (3) Partisipasi pada tahap pengawasan. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa yaitu (1) tidak adanya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat yang menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa. (2) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa, (3) Masyarakat hanya mementingkan urusan pribadi.

Kata Kunci : *Partisipasi Masyarakat, Alokasi Dana Desa*

ABSTRACT

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWASI ALOKASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA LABUHAN BONTONG KECAMATAN TARANO KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018

Oleh

**FIKY RISKI
NIM 21513A0039**

This study aims to determine and analyze community participation in overseeing the allocation of village funds and factors that influence community participation in overseeing the allocation of funds in Labuhan Bontong Village, Tarano District, Sumbawa Regency.

Literature review of this research is participation, community, participatory development models, villages, allocation of village funds, rural economy.

The method used to achieve the objectives in this research is descriptive qualitative method. Data collection methods used were interview, observation and documentation techniques. The validity of the data uses source triangulation. Data analysis techniques using data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification.

The results of this study took the form of community participation in overseeing Village Fund Allocation consisting of three forms, namely (1) Community participation in the planning stage, (2) participation in implementation (3) Participation in the supervision stage. Factors affecting community participation in Labuhan Bontong village, Tarano District Sumbawa Regency is (1) the absence of socialization from the village government to the community which is a factor influencing the implementation of the Village Fund Allocation policy. (2) Lack of community awareness of village development, (3) The community is only concerned with personal matters.

Keywords: Community Participation, Village Fund Allocation

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu negara pada hakekatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, begitu juga dengan negara Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV, yakni tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Maka dari itu, pembangunan nasional perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Beberapa tahun terakhir, perkembangan penduduk di Indonesia terjadi demikian pesat. Hasil proyeksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21%) bertempat tinggal di pedesaan, dan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79%) tinggal di daerah perkotaan. (Sumber: <http://www.bps.go.id> diakses pada tanggal 10 Desember 2017)

Jumlah penduduk Indonesia yang lebih banyak tinggal di pedesaan harus diimbangi dengan pemerataan pembangunan yang tidak hanya terfokus di daerah pusat saja. Pembangunan infrastruktur termasuk dalam pembangunan fisik yang keberadaannya memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang.

Selain itu, wilayah yang memiliki kelengkapan infrastruktur yang berfungsi dengan baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. (*www.pu.go.id diakses tanggal 1 Desember 2017*)

Dalam mewujudkan pembangunan desa seperti yang dikehendaki oleh masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari setiap kalangan, mulai dari rakyat biasa hingga segenap aparat di semua lini birokrasi. Selain itu, potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal.

Sebagai negara yang menganut asas desentralisasi, pemerintah negara Republik Indonesia memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa desa mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Selain itu, Undang-undang desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Borni, 2015).

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah anggaran pembangunan secara khusus yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 yang dimaksud Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah desa

dituntut untuk mengelola Dana Desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud yaitu sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam memanfaatkan Dana Desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan Dana Desa.

Melalui pemberian Dana Desa ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di pedesaan, memberi manfaat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui bantuan tersebut diharapkan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam program pembangunan. Bentuk pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Sumbawa.

Dalam memanfaatkan Dana Desa tentu dibutuhkan partisipasi masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini. Hal ini sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat 2 yang menyatakan bahwa masyarakat wajib berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi atau peran serta masyarakat merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan (Adisasmita 2006: 34). Sebagai wujud dari pelaksanaan pembangunan di Desa Labuhan Bontong.

Masyarakat Desa Labuhan Bontong diberi peluang untuk berperan aktif mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi setiap tahap pembangunan yang dijalankan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Labuhan Bontong dalam meningkatkan partisipasi masyarakatnya adalah pelaksanaan musyawarah dusun, pramusrenbang, dan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) yang rutin diselenggarakan satu tahun sekali.

Dalam pelaksanaan musyawarah dusun ini pemerintah setempat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam proses perencanaan pembangunan. Pada saat kegiatan ini berlangsung masyarakat bisa dengan leluasa memberikan masukan dan tanggapan demi kemajuan desanya meskipun tidak semua masukan dapat direalisasikan. Setelah itu, hasil dari musyawarah dusun tersebut dikaji kembali oleh tim yang beranggotakan 11 orang yang terdiri dari beberapa perangkat desa dalam pramusrembang. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di masing-masing dusun. Hasil pramusrembang tersebut menjadi keputusan yang sudah tidak dapat dirubah lagi karena sudah ditentukan berdasarkan usulan masyarakat dan telah disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia.

Sebagai salah satu desa yang menerima dan memanfaatkan Dana Desa, pemerintah Desa Labuhan Bontong mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur fisik dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai wujud dari keberhasilan pembangunan tersebut, pada tahun 2018 Desa Labuhan Bontong terpilih sebagai penyelenggara MTQ antar sekecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa. Kegiatan lomba tersebut juga sebagai tolak ukur dalam melihat efektifitas dalam membangun

desa/kampung melalui pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa. Sehubungan dengan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Alokas Dana Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam mengawasi alokasi dana desa untuk meningkatkan perekonomian di Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa di desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa?

1.3. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan diadakan penelitian ini

adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam mengawasi alokasi dana desa untuk meningkatkan perekonomian desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengawasi alokasi dana Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berarti melakukan penyelidikan dari, untuk, alasan dan konsekuensinya terhadap suatu keadaan. Manfaat penelitian ini ada dua yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah, serta dapat melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah pembangunan desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang khususnya pada pembangunan di Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Partisipasi

2.1.1. Pengertian Partisipasi

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris “*participation*” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Selanjutnya Juliantara (2002: 87) menjelaskan bahwa partisipasi adalah bekerjanya suatu system pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Howell S. Baum (2015: 1) memberikan definisi dari partisipasi masyarakat merujuk pada “keterlibatan anggota masyarakat dalam pemerintahan dalam berbagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat, dan bentuk-bentuk termasuk aktivitas yang memungkinkan beberapa individu dan kelompok –kelompok yang representative untuk mempengaruhi keputusan publik (begitu juga dengan pihak privat) yang menggambarkan kepentingan mereka”.

Sumarto (2004: 17) juga memberikan definisi partisipasi masyarakat sebagai “proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Pendapat tersebut menggambarkan bahwa partisipasi dari masyarakat dalam segala aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik itu dalam hal perencanaan, pelaksanaan ataupun dalam hal pemantauan atau pengawasan. Selama ini partisipasi diperlakukan sebagai masukan dalam proses pembangunan, sebagai suatu prasyarat mutlak bagi tercapainya tujuan pembangunan. Partisipasi diartikan sebagai dana dan daya yang dapat disediakan atau dapat dihemat sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

2.1.2. Bentuk-bentuk Partisipasi

Ndraha (2001: 103) menjelaskan lima bentuk partisipasi yang meliputi: (1) Peran serta dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai suatu titik awal dalam perubahan sosial. (2) Peran serta dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, memenuhi, dan melaksanakan) menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya. (3) Peran serta dalam pelaksanaan operasional pembangunan. (4) Peran serta dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan. (5) Peran serta dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai

sejauhmana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauhmana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat juga dijelaskan oleh Huraerah (Septyasa, 2013: 6) yaitu (1) Partisipasi buah pikiran. (2) Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya. (3) Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya. (4) Partisipasi keterampilan dan kemahiran. (5) Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban.

Sedangkan Effendi (Sari, 2016: 60) membagi partisipasi dalam dua bentuk, yaitu (1) Partisipasi vertical. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. (2) Partisipasi Horizontal, dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa sendiri dimana setiap orang atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda pemulaan timbulnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Selanjutnya menurut Yadav (Theresia, 2014: 198), empat bentuk partisipasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan

Setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggaranya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau tingkat lokal.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. Selain partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati.

3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi

Pembangunan Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang

diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang. Namun, pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrator pembangunan pada umumnya, yang seringkali menganggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan itu otomatis manfaatnya akan pasti dapat dirasakan oleh masyarakat sarannya. Padahal seringkali masyarakat sasaran tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan menjadi sia-sia.

2.1.3. Tingkat Partisipasi

Tingkatan partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan perlu diketahui oleh agen pembangunan. Oleh karena itu, indikator dalam mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat penting dipahami secara benar.

Mengukur partisipasi masyarakat menurut Ife dan Tesoriero (2016: 17) secara kualitatif mencakup (1) Suatu kapasitas masyarakat yang tumbuh untuk mengorganisasi aksi. (2) Dukungan yang tumbuh dalam masyarakat dan jaringan yang bertambah kuat. (3) Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal seperti keuangan dan manajemen proyek. (4) Keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan. (5) Peningkatan kemampuan dari mereka yang berpartisipasi dalam mengubah keputusan menjadi aksi. (6) Meningkatnya jangkauan partisipasi melebihi proyek untuk mewakilinya dalam organisasi-organisasi lain. (7) Pemimpin-pemimpin yang muncul dari masyarakat. (8) Meningkatnya jaringan dengan proyek-proyek, masyarakat, dan organisasi lainnya, dan (9) Mulai mempengaruhi kebijakan.

Sementara itu, Wilcox (Theresia, 2014: 202) mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan partisipasi, yaitu (1) Memberikan informasi (*information*). (2) Konsultasi (*consultation*); yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut. (3) Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*); dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan. (4) Bertindak bersama (*acting together*); dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan. (5) Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*); dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

2.1.4. Faktor keberhasilan Partisipasi

Slamet (Theresia, 2014: 207) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu (1) adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi, (2) adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dan (3) adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Selanjutnya Goldsmith (Ndraha, 2001: 105), menjelaskan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika (1) partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan, (2) partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan, (3) manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat, (4) dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

2.1.5. Faktor Penghambat Partisipasi

Soetrisno dalam Theresia (2014: 211) mengidentifikasi beberapa masalah kaitanya dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yakni:

1. Masalah pertama dan terutama dalam pengembangan partisipasi masyarakat

adalah belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

- 1) Pada tataran perencanaan pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh (aparatus) pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai sub-ordinasi pemerintah.
 - 2) Pada pelaksanaan pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedangkan yang dirancang dan ditetapkan masyarakat didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas lebih rendah.
 - 3) Partisipasi masyarakat, sering didefinisikan sebagai kerjasama pemerintah dan masyarakat yang tidak pernah memperhatikan adanya sub-sistem yang disubordinasikan oleh supra-sistem, dan aspirasi masyarakat cukup diakomodasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Masalah kedua adalah, dengan dikembangkannya pembangunan sebagai ideologi baru yang harus diamankan dengan dijaga ketat, yang mendorong aparat pemerintah bersifat otoriter.
 3. Masalah ketiga adalah banyaknya peraturan yang meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi.

2.2. Tinjauan Tentang Masyarakat

2.2.1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

Menurut Noor (2007:85) masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Tatanan kehidupan, norma-norma yang mereka miliki itulah yang menjadi dasar kehidupan sosial dalam lingkungan mereka, sehingga dapat membentuk suatu kelompok manusia yang memiliki ciri kehidupan yang khas.

Soekanto (2002: 104) menjelaskan bahwa para antropologi sosial biasanya mengartikan masyarakat sebagai wadah dari orang-orang yang buta huruf, mengadakan reproduksi sendiri, mempunyai adat istiadat, mempertahankan ketertiban dengan menerapkan sanksi-sanksi sebagai sarana pengendalian sosial, dan yang mempunyai wilayah tempat tinggal yang khusus. Istilah masyarakat terkadang dipergunakan dalam

artian “*gesellschaft*” atau sebagai asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terbatas sifatnya, sehingga direncanakan pembentukan organisasi-organisasi tertentu, dalam hal ini maka masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu pula.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan

2.2.2. Ciri-ciri Masyarakat

Suatu kesatuan manusia dapat menjadi suatu masyarakat harus memiliki ikatan yang khusus yaitu adat – istiadat yang khas. Secara rinci, ciri-ciri masyarakat antara lain sebagai berikut. a) Ada interaksi sosial antara warga. b) Ada rasa identitas yang kuat dan mengikat semua warga. c) Ada ikatan yang kas seperti norma adat-istiadat. d) Ada pola- pola perilaku yang berkesinambungan.

Suatu masyarakat tidak secara langsung timbul begitu saja, tetapi sebelum menjadi masyarakat harus diawali dengan adanya sekelompok manusia yang banyak, yang telah mempunyai tempat tinggal di suatu daerah tertentu, dalam waktu yang lama, dan memiliki aturan-aturan yang mengatur kepentingan bersama setelah ada hal-hal tersebut kemudian baru timbullah suatu masyarakat.

Hasim (2013: 13) menjelaskan proses terbentuknya masyarakat pada umumnya berlangsung tanpa disadari yang diikuti hampir sebagian besar anggota masyarakat. Adapun factor-faktor yang menyebabkan terbentuknya masyarakat antara lain sebagai

berikut. a) Keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar biologis, seperti sandang, pangan dan papan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut diperoleh melalui kerja sama dalam hidup berkelompok daripada sendiri-sendiri. b) Keinginan untuk bersatu dengan manusia lain dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. c) Keinginan untuk bersatu dengan lingkungan hidupnya. d) Keinginan manusia untuk mengembangkan keturunan melalui keluarga yang merupakan kasatuan masyarakat yang kecil. e) Kecenderungan sosial manusia, yaitu seluruh semua tingka lakunya yang berkembang merukan akibat interaksi sosial dengan sesama manusia.

2.2.3. Unsur-Unsur Masyarakat

Dari beberapa definisi di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. a) Manusia yang hidup bersama b) Berinteraksi dalam waktu yang cukup lama c) Adanya kesadaran anggotanya sebagai satu kesatuan d) Suatu sistem kehidupan bersama yang menciptakan kebudayaan.

Mario Levi dalam (Atik Catur Budiati, 2009: 13). Berpendapat bahwa unsur-unsur masyarakat menurut pemikirannya adalah masyarakat terdiri dari empat kreteria yang harus dipenuhi agar sebua kelompok dapat disebut sebagai suatu masyarakat: 1) Kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seseorang anggotanya 2) Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran. 3) Adanya sistim tindakan utama yang bersifat swasembada. 4) Kesetian pada suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama.

Edwar shilis dalam (Atik Catur Budiati, 2009: 13) berpendapat bahwa kreteria masyarakat adalah, masyarakat pada aspek pemenuhan kebutuhan sendiri yang dibaginya

dalam tiga komponen yaitu pengaturan, reproduksi sendiri, dan penciptaan diri. Dari bernagi rumusan masyarakat tersebut dapat kalian artikan bahwa masyarakat secara sosiologi mempunyai makna khusus yang berbeda dengan penggunaan kata sehari-hari karena tidak semua kumpulan manusia di suatu tempat disebut masyarakat.

2.3. Tinjauan Tentang Model Pembangunan Partisipasi

T.R Batten dalam Nyoman (2003: 67) mengatakan bahwa pembangunan itu suatu proses di mana orang atau masyarakat desa mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan tersebut. Sementara itu, Riyadi dalam Theresia (2014: 2) mengatakan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.

Menurut Sumodiningrat dalam Tsanita (2016: 22), mengatakan model pembangunan partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal dalam wadah pembangunan yang dimiliki, dengan menekankan upaya pengembangan kapasitas masyarakat untuk memberdayakan masyarakat. Pembangunan partisipatif merupakan sebuah konsep yang sudah dipakai sejak awal dekade 1980-an, pemerintah mengadopsi skema pembangunan dari bawah (*Bottom-Up planning*), yang berangkat dari partisipasi masyarakat tingkat kelurahan, kemudian dibawah tingkatan kecamatan dan akhirnya bermuara pada sistem pembangunan nasional.

Sementara Nurcholis dalam Tsanita (2016: 22) mengatakan bahwa

pembangunan partisipatif adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan masalah, terlibat proses penggodokan (konversi), ikut memantau implementasi dan aktif melakukan evaluasi. Pelibatan masyarakat tersebut diwakili oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri atas kelompok politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik. Dalam mewujudkan suatu pembangunan, diperlukan kerjasama yang baik oleh banyak pihak antara lain pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

2.4. Tinjauan Tentang Desa

2.4.1. Pengertian Desa

Konsep Desa merupakan unit Pemerintahan yang berada pada level paling bawah, dimana Desa merupakan unit Pemerintahan yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas untuk menjalankan Pemerintahan Desa. Keberadaan Desa diakui oleh Pemerintah dalam Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soenarjo (Nurcholis 2011; 4) desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut Beratha dalam Nurcholis (2011; 4) : Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “Badan Hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Dari uraian tersebut, peneliti menguraikan Desa adalah suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu yang ditempati oleh sejumlah orang yang disebut masyarakat yang memiliki satu kesatuan dan adat istiadat yang hidup saling mengenal dan bergotong-royong. Masyarakat desa sebagian besar mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani atau nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Desa ditempati oleh masyarakat yang saling mengenal yang didasari oleh hubungan kekerabatan, kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang menjadikannya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan pada adat istiadat, sehingga akan terwujud ikatan lahir batin diantara warga masyarakat.

2.4.2. Jenis-Jenis Desa

Sugihen (2004: 25) membagi empat jenis desa. Keempat jenis desa tersebut adalah sebagai berikut.

1. Desa Sederhana (pra desa)

Desa pada kategori ini disebut sebagai pemukiman sementara, mungkin hanya tempat persinggahan dalam satu perjalanan karena kebiasaan orang-orang yang sering berpindah-pindah, karena tempat tersebut pada saatnya akan ditinggalkan lagi. Pola permukiman seperti ini mempunyai ciri yang khas. Hampir tak ada orang atau keluarga yang tinggal atau menetap disana, karena semua penghuninya akan pindah lagi pada saat panen selesai, atau bila lahan sebagai sumber penghidupan utama tidak lagi memberi hasil yang memadai.

2. Desa Swadaya

Desa ini bersifat sedenter, artinya sudah ada kelompok (keluarga) tertentu yang bermukim secara menetap disana. Pemukiman ini umumnya masih tradisional dalam arti bahwa sumber penghidupan utama masyarakatnya masih berkaitan erat dengan usaha tani termasuk meramu hasil hutan, beternak dan memelihara ikan di tambak-tambak kecil. Teknologi pertanian yang dipakai masih rendah, tenaga hewan dan manusia merupakan sumber utama energi teknologi usaha tani yang dipakai. Hubungan antar personal dan atau kelompok (masyarakat) sering didasarkan dan diikat oleh adat istiadat yang ketat. Tingkat pendidikan sebagai salah satu indikator tipologi desa itu

belum berkembang dan desa-desa seperti ini jauh dari pusat-pusat kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, prasarana sering kurang memadai dan kurang terpelihara.

3. Desa Swakarya

Pada desa ini, adat yang merupakan tatanan hidup bermasyarakat sudah mulai mendapatkan perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam aspek kehidupan sosial budaya lainnya. Adat tidak lagi terlalu ketat mempengaruhi atau menentukan pola perilaku anggota masyarakat. Lapangan pekerjaan sudah mulai kelihatan lebih bervariasi daripada di desa swadaya. Produksi usaha tani tidak lagi hanya sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diupayakan untuk bisa ditukarkan dengan barang lain melalui sistem pasar. Produktivitas tenaga kerja bertambah melalui masukan teknologi dan prasarananya relatif sudah memadai dan terpelihara secara baik. Kendatipun jarang orang yang sudah menamatkan pendidikan sekolah menengah, namun rata-rata orang telah menamatkan pelajaran Sekolah Dasar.

4. Desa Swasembada

Desa swasembada merupakan pola desa yang terbaik dari bentuk-bentuk desa yang terdahulu. Prasarana desa sudah baik, bentuk rumah bervariasi dan memenuhi syarat-syarat pemukiman yang baik. Masyarakat sudah banyak yang berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas. Mata pencaharian sudah sangat bervariasi dan kebanyakan masyarakatnya tidak lagi menggantungkan hidupnya pada hasil sektor usaha tani yang diusahakan sendiri. Masyarakat desa swasembada adalah masyarakat yang sudah terbuka dengan masyarakat di luar desanya, pengaruh dari luar itu terlihat dalam perilaku orang-orang desa yang sudah mulai menggunakan teknologi canggih

walaupun belum merata. Angkutan umum mudah diperoleh dan banyak masyarakat yang menggunakan alat komunikasi seperti telepon dan pesawat televisi warna dengan antena parabola. Serta banyak masyarakat yang sudah berpendidikan sarjana.

2.4.3. Keuangan Desa

Menurut M. Hadi dalam Soeradi (2014: 7), keuangan publik adalah semua hal dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Van Der Kemp dalam Soeradi (2014: 7), mendefinisikan keuangan publik adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.

Keuangan desa menurut pasal 72 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaran urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintahan daerah.

Menurut pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya desa dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain hasil

pendapatan desa yang sah.

2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) , berupa Dana Desa.
3. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10%
4. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dibagi untuk setiap desa secara proporsional, disebut Alokasi Dana Desa
5. Bantuan Keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2.5. Tinjauan Tentang Alokasi Dana Desa

2.5.1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

1. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguataan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
5. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

2.5.2. Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Soemantri (2011: 157) tujuan Alokasi Dana Desa sebagai berikut.

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

2.5.3. Manfaat Alokasi Dana Desa

Menurut Sahdan, dkk. (2006: 6) terdapat beberapa manfaat ADD bagi kabupaten/kota yakni sebagai berikut.

1. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota
2. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang (Tim FPPD, 2005).
3. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional pemerintahan desa besarnya tidak pasti.

4. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa
6. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa
7. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan
8. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain-lain dapat tercipta.

2.6. Tinjauan Tentang Perekonomian Masyarakat Desa

2.6.1. Pengertian Perekonomian Masyarakat Desa

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perdesaan didefinisikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Meskipun pendekatan peraturan umumnya menggunakan pendekatan administratif, pengertian dalam undang-undang tersebut merujuk pada definisi secara fungsional. sehingga, dalam lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum sendiri, dikenal istilah perkotaan kabupaten meskipun bentuk struktur pemerintahannya menggunakan 'desa'.

Sedangkan menurut Suhardjo (2008: 32) dalam beberapa dekade terakhir mulai terjadi perubahan-perubahan definisi kawasan perdesaan. Hal tersebut dikarenakan mulai berubahnya tipologi kawasan perdesaan dan perkembangan kawasan perdesaan dalam beberapa waktu terakhir. Terutama setelah era globalisasi yang masuk ke perdesaan, telah terjadi interaksi dan negosiasi sosial budaya masyarakat perdesaan terhadap modernitas dan budaya luar. Fahaman dikotomi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan mulai ditinggalkan dengan tidak relevannya pemahaman tersebut dengan mulai biasanya perdesaan-perkotaan.

Dalam definisi klasik, secara ekonomi kawasan perdesaan dikategorikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian sedangkan kawasan perkotaan dikategorikan sebagai wilayah dengan kegiatan utama di sektor jasa dan perdagangan. Definisi tersebut masih banyak digunakan hingga saat ini. Namun munculnya kawasan perdesaan dengan perekonomian yang ditopang oleh kegiatan industri kecil seperti kerajinan, pariwisata, definisi tersebut dirasa belum dapat mewakili keseluruhan tipologi kawasan perdesaan. Oleh karenanya muncul istilah-istilah seperti desa-kota yang berusaha mendefinisikan kawasan-kawasan perdesaan yang dianggap memiliki ciri-ciri perkotaan baik secara fisik maupun sosial dan ekonomi (Suhardjo, 2008: 46)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia ekonomi pedesaan adalah ekonomi yg berdasarkan hasil produksi dari daerah pedesaan, biasanya bersifat tradisional. Pendapatan rumah tangga pertanian ditentukan oleh tingkat upah sebagai penerimaan faktor produksi tenaga kerja. Nilai sewa tanah sebagai penerimaan dari penguasaan

asset produktif lahan pertanian. Dengan demikian tingkat pendapatan rumah tangga pedesaan sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan faktor produksi.

2.6.2. Faktor Pengaruh Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa

Ada lima faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat di desa (Ndraha, 2001: 43). Berikut ini kelima faktor tersebut:

1. Sumber Daya Alam Yang Ada

Faktor sumber daya alam yang ada sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat. Desa yang kaya akan sumber daya alam perekonomiannya akan lebih maju. Sumber daya alam ini bisa berupa kondisi tanah yang subur, kondisi laut yang banyak ikannya dan juga beberapa lainnya.

2. Regulasi Dari Pemerintah

Regulasi atau kebijakan dari pemerintah juga sangat berpengaruh pada ekonomi desa. Tentu saja masyarakat desa mengharapkan sebuah kebijakan yang menguntungkan masyarakat desa. Kebijakan yang dianggap menguntungkan seperti subsidi pupuk dan penurunan pajak untuk petani.

3. Jumlah Penduduk Desa

Sadar atau tidak, jumlah penduduk desa juga mempengaruhi kesejahteraan. Masyarakat di desa umumnya lebih menyukai memiliki banyak anak dibandingkan masyarakat di kota. Jumlah anggota keluarga yang banyak ini secara tidak langsung mempengaruhi ekonomi di desa.

4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa

Untuk urusan kualitas pendidikan, masyarakat desa masih jauh tertinggal dengan masyarakat perkotaan. Padahal jelas jika tingkat pendidikan masyarakat desa mempengaruhi kondisi ekonomi pada masyarakat tersebut. Desa yang pendidikannya sudah maju, perekonomiannya akan mudah berkembang. Sebaliknya, desa yang pendidikannya kurang akan lesu dalam perekonomian.

5. Adat Dan Tradisi Setempat

Harus diakui jika adat dan tradisi setempat akan mempengaruhi bagaimana penduduk desa akan memenuhi kebutuhan ekonominya. Masyarakat desa yang memiliki adat dan tradisi yang mendukung kerja keras akan lebih mudah berkembang. Setiap desa tentunya memiliki adat dan tradisi masing-masing.

Semua informasi lengkap seputar ekonomi masyarakat desa di atas sangat penting untuk diketahui. Bagaimanapun juga, kemajuan ekonomi masyarakat desa adalah tanggung jawab bersama. Jika ekonomi di desa maju, maka rakyat akan sejahtera.

2.6.3. Sektor yang Menopang Ekonomi Masyarakat Desa

Memajukan perekonomian di desa adalah tugas yang sangat penting. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah masyarakat pedesaan. Dalam memutar roda perekonomian, jelas ada perbedaan yang jauh antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Ekonomi masyarakat desa ditopang oleh beberapa sektor pendapatan. Semua sektor inilah yang harus ditingkatkan agar ekonomi masyarakat desa bisa maju dan berkembang.

Pada umumnya, ada 5 sektor yang menopang ekonomi masyarakat di desa (Theresia, 2014: 42). Jika kelima sektor ini mengalami kendala, maka akan membuat penurunan pendapatan ekonomi. Berikut ini kelima sektor tersebut dan penjelasannya:

1. **Sektor Pertanian**



Sektor pertanian adalah bidang utama yang menjadi mata pencarian penduduk desa. Desa memberikan peranan yang sangat vital sebagai pertahanan pangan suatu negara. Kemajuan ekonomi dalam sektor pertanian akan menghindarkan negara dari kondisi impor. Komoditi di pertanian ini beragam mulai dari padi, sayuran, dan jagung.

2. **Sektor Peternakan**



Selain bergantung pada sektor pertanian, ekonomi masyarakat desa juga bergantung pada sektor peternakan. Ada banyak peternakan yang ada di desa-desa. Semua peternakan ini biasanya masih bersifat konvensional. Beberapa binatang ditanam di desa seperti kambing, sapi, ayam, bebek dan beberapa jenis ikan tertentu.

3. **Sektor Industri Kreatif**

Industri kreatif nyatanya juga menjadi pendapatan ekonomi masyarakat di desa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya usaha dalam bidang kreatif di Indonesia. Industri kreatif ini biasanya akan menghasilkan sebuah karya kerajinan tangan. Contoh komoditi dari industri ini seperti kursi rotan, tas dari bambu, sarung tenun dan beberapa komoditi lainnya.

4. **Sektor Perikanan**

Sektor perikanan berbeda dengan sektor peternakan. Pada sektor ini, masyarakat desa tidak melakukan kegiatan ternak untuk mendapatkan ikan melainkan langsung

mencarinya di alam. Contoh pekerjaan pada sektor ini adalah nelayan yang mencari ikan di laut. Oleh sebab itu, sektor ini biasanya berkembang di desa-desa yang berada pada kawasan pesisir.

5. Sektor Pariwisata

Mayoritas tempat wisata yang ada di Indonesia berada di kawasan pedesaan. Tentu saja hal ini berimbas pada geliat ekonomi masyarakat yang ada di desa. Adanya tempat wisata di suatu desa akan menambah variasi mata pencaharian masyarakat desa. Masyarakat desa yang tinggal di kawasan wisata biasanya bekerja sebagai pemandu dan penawaran jasa lainnya untuk wisatawan yang datang.

Itulah 5 sektor yang menopang perekonomian masyarakat desa. Kondisi perekonomian di desa juga dipengaruhi banyak faktor. Faktor-faktor ini bahkan bersifat vital dan harus dijaga dengan baik.

2.6.4. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa

Ekonomi masyarakat desa menjadi indikator keberhasilan perkembangan ekonomi sebuah negara. Hal itu karena bagian terkecil dari sebuah negara adalah desa, yang hingga kini masyarakatnya masih jauh dari kesan maju. Dalam upaya memajukan desa peningkatan ekonomi masyarakat desa terlebih dahulu harus dilakukan oleh pemerintah (Suhardjo, 2008: 58). Upaya tersebut bisa dilakukan dengan menerapkan beberapa cara seperti:

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur

Pertama, sudah diketahui umum jika infrastruktur adalah kunci utama kemajuan ekonomi sebuah desa. Namun sayangnya masih banyak sekali proyek

infrastruktur desa yang terbengkalai dan tidak terselesaikan. Hal ini menjadi kendala utama dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa. Infrastruktur menjadi poin penting sebuah desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur yang memadai memudahkan masyarakat desa untuk melakukan mobilisasi barang dan jasa keluar dan masuk desa. Kemajuan infrastruktur juga akan menarik minat investor untuk berinvestasi bagi kemajuan desa.

Jika ada investasi maka pembangunan sarana transportasi untuk kelancaran kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Maka meningkatkan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

2. Memajukan Potensi Desa

Kedua, setelah masalah infrastruktur bisa teratasi maka selanjutnya adalah mengembangkan potensi yang dimiliki desa. Jika menggunakan kejelian dalam mengamati kehidupan masyarakat desa, maka pasti akan ditemukan potensi besar yang dimiliki sebuah desa yang bisa dikembangkan. Pengembangan potensi desa ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa tentunya.

Potensi pedesaan yang bisa dimajukan seperti berbagai kerajinan tangan, obyek wisata, hasil bumi, kekayaan kuliner semua potensi yang ada di desa. Pemerintah harus memegang peranan untuk mengontrol upaya memajukan potensi desa yang ada dan memberi fasilitas yang dibutuhkan. Sedangkan masyarakat harus berperan aktif ikut memajukan potensi desa tempat tinggalnya sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa.

3. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Ada Di Desa

Ketiga, saatnya untuk memikirkan sumber daya manusia sebagai potensi besar untuk membantu proses percepatan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Semua upaya untuk meningkatkan ekonomi tidak akan lepas dari sumber daya manusia di desa sebagai pelaku utama. Untuk itu membangun SDM sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah desa.

Sampai saat ini persoalan SDM di desa masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk diselesaikan. Presiden sudah menegaskan setelah masalah infrastruktur terselesaikan maka selanjutnya yang perlu dibenahi adalah pembangunan SDMnya. Setelah semua teratasi maka ekonomi masyarakat desa akan mengalami peningkatan yang signifikan.

4. Memanfaatkan Teknologi

Keempat, setelah sumber daya manusia dibangun maka kini telah mampu ikut serta berperan aktif meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat desa lebih lanjut bisa memanfaatkan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan sebagai upaya peningkatan ekonominya.

Memajukan ekonomi desa menggunakan teknologi pasti akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan tanpa teknologi. Sebagai upaya promosi potensi yang dimiliki desa misalnya, bisa memanfaatkan teknologi internet. Disini lah pemerintah memiliki peran penting untuk menyediakan koneksi internet bagi masyarakat desa.

Selain teknologi internet masih banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa. Seperti misalnya teknologi pengolahan bahan makanan, pengawetan bahan makanan, packing dan lainnya untuk memasarkan potensi kuliner desa. Pemerintah desa harus pandai memberikan materi tentang teknologi tepat guna sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakatnya.

5. Melakukan Proses Berkelanjutan

Kelima, ketika masyarakat desa sudah membenahi infrastruktur, memajukan potensi desa, meningkatkan kemampuan SDM dan teknologi maka pemerintah tinggal menindak lanjuti. Pemerintah pusat atau desa tinggal memberikan program sebagai kelanjutan proses pembangunan ekonomi desa. Program yang diberikan harus bisa melibatkan semua elemen masyarakat desa dalam pelaksanaannya.

Selain itu program harus dilakukan secara berkelanjutan dan terencana sehingga semua elemen bisa memberikan kontribusi kepada ekonomi desa. Program yang berkelanjutan adalah upaya pemerintah untuk menjaga eksistensi dari pemerintah sebagai fungsi pengawas dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Demikian adalah kunci sukses peningkatan ekonomi masyarakat desa yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa bekerjasama dengan masyarakatnya. Kemajuan masyarakat desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga masyarakatnya. Oleh karena itu pemerintah harus pandai merangkul dan memfasilitasi masyarakat untuk memajukan desa bersama-sama.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran, orang secara individual, ataupun kelompok, berguna untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan (Suryana, 2015: 53)

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, karena memberikan pendeskripsian tentang situasi yang kompleks. Hal ini sejalan dengan pendapat Guba (Suharsaputra, 2012: 181) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati secara kompleks.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, mendeskripsikan data berarti menguraikan, memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Jadi untuk menguraikan data dalam penelitian ini, peneliti memerlukan data yang berupa dokumen secara lisan maupun tertulis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, institusi dan sebagainya dalam waktu tertentu (Sugiarto, 2015: 12). Jadi, tujuan peneliti dalam penelitian studi kasus ini berusaha menyelidiki proses, serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam secara utuh dari individu, kelompok, atau situasi tertentu.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus tunggal. Creswell (Mahsun, 2014: 43) menjelaskan penelitian studi kasus tunggal adalah penelitian studi kasus yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kasus untuk menggambarkan sebuah isu atau perhatian. Jadi, peneliti memperhatikan dan mengkaji suatu isu yang menarik perhatiannya dan menggunakan sebuah kasus sebagai sarana (instrumen) untuk menggambarannya secara terperinci.

3.2. Fokus Penelitian

Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian dilakukan pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Menurut Sugiyono (2016: 207), penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus penelitian ini adalah mengkaji manajemen pengelolaan Dana Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan serta mengkaji tentang partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan

dan partisipasi dalam menikmati hasil pembangunan. Hasil Pembangunan tersebut dalam bentuk Infrastruktur dan pembedayaan ekonomi masyarakat.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang di gunakan untuk melakukan penelitian agar peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak diteliti. Penelitian ini berlokasi di Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten sumbawa.

3.4. Sumber Data

Sumber data merupakan asal-usul dari apa, siapa, dan mana data diperoleh (Muhammad, 2011: 154). Oleh karena itu data secara lokasional dapat berasal dari konteks, dokumen, dan informan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data ini langsung memberikan data kepada pengumpul data.
2. Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah, laporan pemerintah, artikel, dan buku-buku sebagai teori. Data yang diperoleh dari sekunder tidak perlu diolah lagi. Sumber data ini tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari RPJM Desa, RKP Desa, APBDesa, Berita Acara

Rapat, Peraturan Desa dan laporan kepala desa.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah menyediakan, memilih, memilah dan menata data (Muhammad, 2011: 187). Dalam aktifitas ini, peneliti akan mencurahkan energi, seluruh kemampuan, terutama penguasaan teori atau konsep struktur, untuk mengambil data yang dibutuhkan sesuai dengan parameter struktur. Penyediaan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang digunakan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa deskripsi faktual, cermat dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks di mana kegiatan ini terjadi dan berhubungan dengan fokus penelitian. (Ismawati, 2011: 98). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati partisipasi masyarakat dalam mengawasi alokasi dana desa untuk meningkatkan perekonomian Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Tahun 2018.

Selanjutnya Suryana (2015: 232) mengatakan bahwa dalam mengungkapkan

Lembar Observasi	
obs	Aktifitas/Kejadian :
pen	Tempat :
	Subjek :
keja	Peneliti :
	Tanggal :
bias	Waktu :
ada	Deskripsi.....

	Catatan/Refleksi.....

Gambar 1. Lembar Observasi (Suharsaputra, 2012: 213)

2. Wawancara

Metode wawancara adalah sebuah dialog atau percakapan yang dilakukan oleh pewawancara kepada terwawancara untuk mendapatkan sebuah informasi secara langsung dari responden yaitu kepala atau staf di Kantor Desa Labuhan Bontong. Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2010: 198). Maka dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Suryana, 2015: 180). Jadi, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pedoman Wawancara		Tanggal/Bulan/Tahun
Nama Informan	: Kamararuddin	2
Umur	: 49 Tahun	
Jabatan	: Sekertaris Daerah	
Alamat	: Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano	
No. HP	:	



Gambar 2. Pedoman Wawancara Tak Terstruktur (Suryana, 2015: 227)

3. Dokumentasi

Teknik selanjutnya setelah melakukan wawancara adalah dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data langsung dari tempat penelitian. Suryana (2015: 181), menjelaskan bahwa metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui wawancara.

Selanjutnya Ismawati (2011: 99) menjelaskan bahwa teknik dokumentasi adalah alat pengumpulan data dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen praturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini berupa Surat

Pertanggungjawaban (SPJ), foto kegiatan, dan Alokasi Dana Desa (ADD).

3.6. Teknik Analisis Data

Patton (Muhammad, 2011: 211) menjelaskan bahwa analisis data merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan dasar. Artinya data diurutkan dikelompokkan sesuai dengan pola, kategori dan satuannya.

Analisis data dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan makna yang terkandung dalam sebuah data, sehingga interpretasinya tidak sekadar deskripsi belaka. Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman (Mahsun, 2014: 270) dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan peneliti. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarikannya bila diperlukan. Jadi reduksi data merupakan suatu

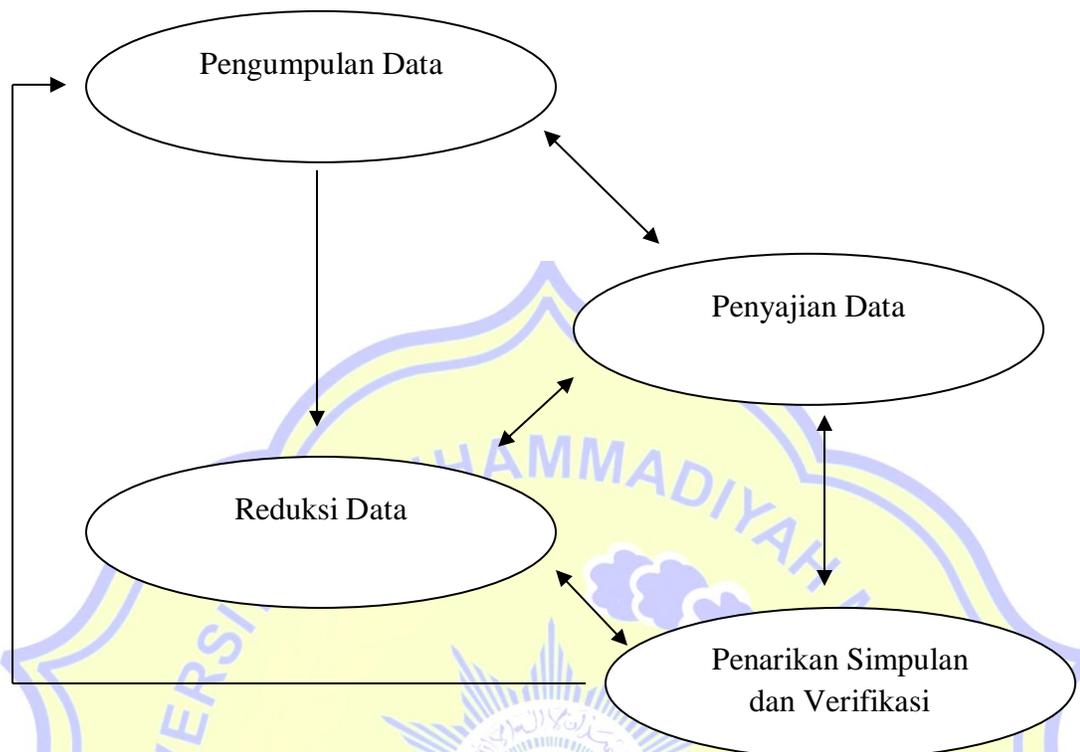
bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan dengan cara sedemikian sehingga simpulan-simpulan akhirnya ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Melalui penyajian data maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahamai dan akhirnya akan diperoleh data yang mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam mengawasi alokasi dana desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Tahun 2018. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya akan banyak menolong peneliti.

4. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Penarikan simpulan dan verifikasi merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan simpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan data yang telah disajikan. Simpulan berupa partisipasi masyarakat dalam mengawasi alokasi dana desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Tahun 2018, serta pencatatan dokumen yang diperoleh dari informan, yang telah teruji kebenarannya dan kesesuaiannya selama penelitian berlangsung sehingga mendapatkan simpulan yang efektif dan valid. Berdasarkan uraian tersebut, teknik analisis interaktif dapat divisualisasikan pada gambar berikut ini.



Gambar 3. Teknik Analisis Interaktif Miles dan Huberman (Mahsun, 2014: 270)

3.7. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Siswanto (2010: 79), triangulasi yaitu tindakan menguji atau mengecek data temuan dengan temuan lain selagi tidak adanya kekontrasan atau asal adanya kesesuaian antara satu dengan yang lainnya di dalam penelitian. Penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupa pengumpulan dokumen dan hasil wawancara. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkroscek data hasil penelitian dengan perspektif sumber yang berbeda.